

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 10/OT.00/K.KI/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA
KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan tahapan maupun nontahapan pemilihan umum;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan daftar Indikator Kinerja Utama yang mempertimbangkan tahapan maupun non-tahapan pemilihan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan daftar Indikator Kinerja Utama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 284/OT.00/K1/12/2025 Tentang Penetapan Daftar Indikator Kerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu merupakan standar penilaian kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan lampiran keputusan ini;
- KEDUA : IKU Pengawas Pemilu digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur baik pada saat tahapan maupun non-tahapan pemilihan umum;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
 3. Inspektur Wilayah III Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
 4. Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



HARI DERMANTO, S.H.,M.H

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Ketua/Divisi	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1	Ketua Bawaslu Provins	Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi
2		Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi
3		Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4		Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti
5		Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti
6		Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi
7		Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi
8		Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI
9		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi
10		Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu
11		Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI
1	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi
2		Unit kerja berpredikat WBBK Internal
3		Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi
4		Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu
5		Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya
6		Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota
7		Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kot
8		Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan
9		Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI
1	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu

No	Ketua/Divisi	Indikator Kinerja Utama
2		Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu
3		Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu
4		Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu
5		Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu
6		Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu
7		Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan
8		Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama
9		Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain
10		Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Provinsi
11		Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti
12		Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal
13		Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku
14		Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu
15		Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi
16		Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau
17		Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif
18		Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)
19		Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
20		Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI
1	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi
2		Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan
3		Persentase produk hukum yang tersosialisasi
4		Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum

No	Ketua/Divisi	Indikator Kinerja Utama
5		Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum
6		Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota
7		Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa
8		Persentase produk hukum yang terdokumentasi
9		Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu
10		Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengket
11		Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
1	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum
2		Indeks maturitas SPBE
3		Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya
4		Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti
5		Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan
6		Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan
7		Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu
8		Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)
9		Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi
10		Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



HARI DERMANTO, S.H.,M.H